

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat)

Oleh :

Suci Rahmadani

Pembimbing : Kamaliah dan Rofika

Faculty Of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : sucirahmayuda@gmail.com / sucirahmadani95@yahoo.co.id

The Effect of Human Resources Competences, implementation of local financial accounting, used information technology, and internal control system on quality of local government financial reporting
(Studies On SKPD Kabupaten Pasaman Barat)

ABSTRACT

The research aimed to know the influence human resources competence, implementation of local financial accounting system, the use of information technology and the internal control system that affect the quality of local government financial reports. The population of this research is accounting/financial division in SKPD Kabupaten Pasaman Barat and each SKPD 3 respondent. This research used purposive sampling method to taking the sample. The method of collecting the data is using questioner and literature studi. Data collecting the analisis used multiple regression testing t with the aid SPSS software. The result of research indicated that human resources competence, implementation of local financial accounting, used of information technology, and internal control system have an effect to quality of local government financial reporting. For the government agency can be improved the quality of credibility of financial organizing with utilization of human resources competence, implementation of local financial accounting, information technology be optimum and internal control system design availability which are produce financial region government reported is quality.

Keywords: competence, local financial accounting, information technology, internal control, and government

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan

pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Gubernur /Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Sedangkan laporan keuangan sektor publik yang termasuk didalamnya laporan keuangan pemerintah adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik yang tujuannya untuk memberikan informasi keuangan entitas tersebut (Bastian, 2006). Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti keperluan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pengevaluasian kinerja pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah wajib memperhatikan dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa ada empat kriteria atau karakteristik yang menjadikan laporan keuangan berkualitas yaitu 1) relevan, 2) handal, 3) dapat dibandingkan, dan 4) dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta menunjukkan laporan keuangan sudah menuju ke arah yang benar guna mewujudkan anggaran yang tepat sasaran (Beritasatu.com:2014). Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah sudah berkualitas yaitu Opini wajar pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksaan keuangan terhadap LKPD.

Banyak pemerintah daerah dalam situs web pemerintahan mereka yang mencanangkan target untuk mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian. Hal ini juga di dorong dengan adanya target pemerintah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pusat dan daerah untuk menjadi WTP dalam 2014 yang diungkapkan wakil presiden Boediono (Jurnas.com:2014).

Salah satunya adalah pemerintahan daerah kabupaten Pasaman Barat yang pada tahun 2003-2009 memperoleh opini *disclaimer* dari BPK, hal ini mendorong pemerintah kabupaten Pasaman Barat berupaya memperbaiki opini *disclaimer* yang diperoleh pada LKPD 7 tahun sebelumnya. Dan pada

tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 terbukti laporan keuangan Pemerintah Daerah Pasaman Barat mampu memperoleh opini wajar dengan pengecualian.

(Koranpadang.com.2011).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Pasaman Barat belum berkualitas karena masih belum memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sehingga pemerintah perlu membenahi bagian penatausahaan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memperoleh opini WTP dari BPK yang menjadi target pemerintah Pasaman Barat.

Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dibahas pada penelitian ini, Hal pertama yaitu kompetensi sumber daya manusia. Menurut Roviyantie (2011) Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur

mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Saat ini secara bertahap pemerintah akan berpindah dari sistem akuntansi *single entry* ke *double entry*, dan basis akuntansi yang diterapkan pemerintah pun kini mengalami perubahan dari berbasis kas (*cash basis*) menjadi berbasis akrual (*accrual basis*).

Perubahan atas sistem dan basis akuntansi dilakukan untuk mendapatkan laporan keuangan yang handal, relevan, dapat dipercaya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang akan dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

Hak ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, meminimalisir terjadinya kesalahan dan biaya pemrosesan lebih rendah. Pemanfaatan teknologi yang baik diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

Hal keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sistem pengendalian intern. Menurut Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?, 2)

Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?, 3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?, 4) Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Membuktikan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2) Membuktikan pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3) Membuktikan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4) Membuktikan pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:7):

“laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan laporan keuangan sektor publik yang termasuk didalamnya laporan keuangan pemerintah adalah representasi posisi keuangan dari transaksi transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik yang tujuannya untuk memberikan informasi keuangan entitas tersebut (Bastian, 2006).

Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas, yaitu:

1. Relevan, Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan

demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal, Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan, Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

kompetensi sumber daya manusia adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, prilaku dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif (Wirawan, 2009:9).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensinya dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Permendagri nomor 59 tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) didefinisikan sebagai:

“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

PP No 105 Tahun 2001 menyatakan bahwa pemerintah daerah

memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Demi penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang berkualitas, maka kepala daerah menentukan sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan pada peraturan daerah mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Jogiyanto (1995:7), teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (*training*) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas. Komputer telah menggantikan teknologi manual dengan melakukan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks. Komputer juga dapat bekerja sangat konsisten serta reliabel (dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat bila dibanding dengan kemampuan manusia.

Menurut Jogiyanti (1995:7) bahwa aplikasi teknologi sangat berperan dalam pengelolaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen.

Sistem Pengendalian Intern

Peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus

oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari tujuannya, sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua (Bastian dan Gatot, 2002: 204), yaitu : 1). Pengendalian intern akuntansi, Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. 2). Pengendalian administrative, Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dalam suatu organisasi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting, karena yang menjalankan serta mengelola suatu organisasi adalah sumber daya manusianya. Untuk itu, diperlukanlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Sama halnya dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas di butuhkan sumber daya manusia yang berkompeten.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sakd) terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Mardiasmo (2004) mengatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, Handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat (Arfianti, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₃ :Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, menyatakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintah negara/daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Artinya apabila sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan baik, maka seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan baik sehingga akan memberikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang berkualitas.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pasaman Barat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian dan staf bagian keuangan/akuntansi.

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan cara memberikan kuesioner kepada pegawai yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah pada masing-masing SKPD kabupaten Pasaman Barat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan SPSS versi 20.0.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Dalam rangka keperluan penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pasaman Barat. Dengan mengambil masing-masing 3 responden pada setiap SKPD yaitu kepala bagian dan staf bagian keuangan/akuntansi.

Kuesioner disebar sebanyak 93 kuesioner dan yang kembali sebanyak 84 kuesioner (90,32%) dapat digunakan dan dianalisis. kuesioner yang tidak mendapatkan respon adalah 9 kuesioner.

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran tentang ringkasan data dari

masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian yang bertujuan untuk mempermudah memahami data. Nilai rata-rata keempat variabel lebih besar daripada nilai standar deviasinya, sehingga ini menunjukkan bahwa penyebaran data sudah baik.

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif

variabel	N	Mean	Std. Dev
KompetensiSDM	84	40,905	5,379
PenerapanSAKD	84	31,179	5,018
Pemanfaatan TI	84	33,262	3,348
SPI	84	24,869	2,606
Kualitas LK	84	44,381	4,442

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 2015

Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas Data

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *Corrected Item Total Correlation* pada taraf signifikansi 5% (Imam Ghozali, 2013).

Berdasarkan hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa instrumen-instrumen pada variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan daerah adalah valid dan dapat dipakai untuk melakukan penelitian atau menguji hipotesis penelitian, karena memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dilakukan secara statistik sama seperti halnya pengujian validitas data. Uji

reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung *Cronbac'h Alpha* dengan bantuan SPSS 20 for windows. Jika nilai hitung *cronbac'h alpha* besar dari 0,60 maka instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel (handal) dan sebaliknya. Hasil uji reliabilitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Koefisien Cronbac'h Alpha	Keterangan
1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,810	Reliabel
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0,842	Reliabel
3	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,841	Reliabel
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,809	Reliabel
5	Sistem Pengendalian Intern (X4)	0,619	Reliabel

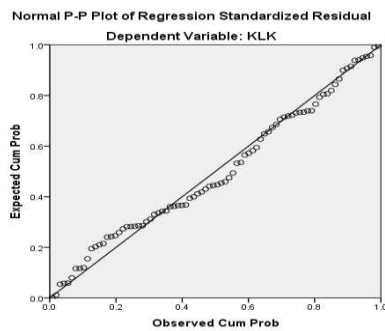
Sumber: hasil pengolahan data 2015 (output SPSS)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.2 diatas diketahui bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, karena *Cronbac'h Alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,60.

Hasil Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini, Uji normalitas data dapat dilihat dari grafik *P-P Plot*. Data dikatakan berdistribusi normal apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Untuk mengetahui normalitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada

gambar 4.1 berikut ini:



Gambar 4.1 Normal P-P Plot

Dari grafik *P-P Plot* dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas Data

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3
Nilai Tolerance dan VIF**

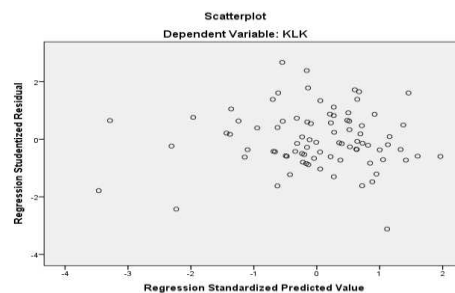
Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0,866	1,154
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,994	1,006
Pemanfaatan Teknologi Informasi(X3)	0,976	1,025
Sistem Pengendalian Intern (X4)	0,863	1,159

Sumber: data olahan SPSS 20.0, 2015

Ketiga variabel ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dari gambar 4.2, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas



Gambar 4.2: Scatterplot

Sumber: hasil pengolahan data 2015 (output SPSS)

Teknik Analisis Data

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	3.628	6.582	
SDM	.413	.076	.500
1 SAKD	.204	.076	.230
TI	.249	.116	.188
SPI	.370	.158	.217

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber: data olahan SPSS 20.0, 2015

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, maka persamaan regresi linear berganda yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y=3,628+0,413X_1+0,204X_2+0,249X_3+0,370X_4+e$$

Keterangan:

Y : Kualitas Laporan Keuangan

X1 : Kompetensi SDM

X2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi

X4 : Sistem Pengendalian Intern

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2015:97). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut

Tabel 4.5
Adjusted R Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.644 ^a	.415	.385	3.48279

Predictors: (Constant), SPIP, SAKD, TI, SDM
Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai R sebesar 0,644 atau 64,4% dan Adj. R Square (R²) sebesar 0,385 atau 38,5%. Hal ini menunjukkan 38,5% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern sedangkan 0,615 atau 61,5% dipengaruhi oleh variabel variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Hasil Pengujian Hipotesis (uji t)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H₀ diterima, demikian pula sebaliknya. Nilai t_{tabel} pada taraf signifikan 5% dengan persamaan sebagai berikut:

$$t_{tabel} = n - k - 1 : \alpha/2$$

$$t_{tabel} = 84 - 4 - 1 : 0,05$$

$$t_{tabel} = 79 : 0,025$$

$$t_{tabel} = 1,990$$

keterangan:

n = jumlah

k = jumlah variabel bebas

1 = konstan

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t)

Model	T	Sig.	
(Constant)	.551	.583	
SDM	5.411	.000	H _a Diterima
SAKD	2.666	.009	H _a Diterima
TI	2.158	.034	H _a Diterima
SPIP	2.343	.022	H _a Diterima

Dependent Variable: Kualitas Laporan keuangan

Sumber: hasil pengolahan data 2015 (output SPSS)

Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,411 > 1,990$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 (< 0,05)$, yang mana t_{tabel} 1,990 diperoleh dari $(n - k - 1 = 84 - 4 - 1 = 79)$ dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$. Dari hasil pengujian diatas, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori yang mengatakan kurangnya jumlah pegawai akuntansi serta latar belakang pendidikan akuntansi pada subbagian akuntansi/tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten pasaman barat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah benar. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Roviyantie (2011) yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya.

Pengaruh Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat . Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,666 > 1,990$ dengan nilai signifikan sebesar $0,009 (< 0,05)$, yang mana t_{tabel} 1,990 diperoleh dari $(n - k - 1 = 84 - 4 - 1 = 79)$ dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$. Dari hasil pengujian diatas, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal, relevan, dapat dipahami dan dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Roviyantie (2011) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena ketika sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan dengan baik, maka akan baik pula

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan

Pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,158 > 1,990$ dengan nilai signifikan sebesar $0,034 (< 0,05)$, yang mana t_{tabel} 1,990 diperoleh dari $(n - k - 1 = 84 - 4 - 1 = 79)$ dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$. Dari hasil pengujian diatas, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan dengan pemanfaatan teknologi informasi maka akan membantu dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti yang telah dielaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa peningkatan total volume APBN/D dari tahun ketahun, dari sisi akuntansi menunjukkan bahwa kuantitas pekerjaan yang semakin besar dan kualitas yang semakin kompleks dan rumit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Celviana dan Rahmawati (2010). Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi karena

peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu.

Pengaruh Sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dari tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,343 > 1,990$ dengan nilai signifikan sebesar $0,022 (< 0,05)$, yang mana t_{tabel} 1,990 diperoleh dari $(n - k - 1 = 84 - 4 - 1 = 79)$ dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$. Dari hasil pengujian diatas, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keterandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008), Dhany (2010), Dita (2011), dan Faristina (2011). Hasil penelitian yang terkait dengan Kegiatan pengendalian ini tentunya menjamin

semua pencatatan akuntansi dan keuangan pemerintah telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga tujuan suatu laporan keuangan akan tercapai dan memenuhi aspek yang berkualitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang berkompeten seperti jumlah yang cukup serta memiliki latar pendidikan akuntansi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan hasil bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan hasil bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan membantu dan mempermudah dalam menyusun laporan keuangan daerah serta mengoreksi data agar terhindar dari kesalahan atau kecurangan sehingga

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

4. Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) menunjukkan hasil bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak, yaitu:

1. Peneliti berikutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya dengan mengambil sampel pada SKPD yang ada di beberapa kabupaten atau bahkan se-Provinsi.
2. Peneliti berikutnya dapat lebih memperhatikan Kuesioner setiap variabel, sebaiknya menggunakan kuesioner baru yang sesuai dengan gambaran keadaan suatu daerah.
3. Peneliti berikutnya dapat lebih maksimal dalam memperoleh data kuesioner. Peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang memungkinkan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Bastian, indra dan Gatot Soepriyanto. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Celviana Winidyaningrum, Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Jogiyanto, HM. 1995. *Analisis dan Desain System Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi Offies. Yogyakarta
- La Midjan, Dan azhar Susanto. 2000. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1.
- Roviyanti, Devi. 2011. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah". *Jurnal akuntansi pemerintahan*
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan.2009.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- <http://www.bpk.go.id>, BPK RI, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*
- <http://m.jurnas.com>. 2014
- <http://m.beritasatu.com>.2012
- <http://Koran-padang>. 2011.